

**PENGARUH PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN (SPP) TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN LANNA
KECEMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Manajemen



Diajukan oleh :

RESTU DENADA SALAM

2015211712

KONSENTRASI PERBANKAN DAN KEUANGAN MIKRO

JURUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

NOBEL INDONESIA

MAKASSAR

2019

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI
PENGARUH PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN (SPP) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KELURAHAN LANNA KECEMATAN
PARANGLOE KABUPATEN GOWA

Diajukan Oleh :

Nama : RESTU DENADA SALAM

NIM : 2015211712

Telah dipertahankan dihadapan penguji Tugas Akhir/Skripsi
STIE Nobel Indonesia pada tanggal 13 Maret 2019 dan dinyatakan diterima
untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Akademi
Sarjana Manajemen – S.M

Makassar, Juli 2019

Tim Penguji :

Pembimbing : **Dr. AHMAD FIRMAN, S.E., M.Si**

Sekretaris : **ANDI WIDIAWATI, SE., M.Si**

Anggota : **MARIAH, SE., M.Pd**



1.

2.

3.

Mengesahkan,

Wakil Ketua I
Bidang Akademi

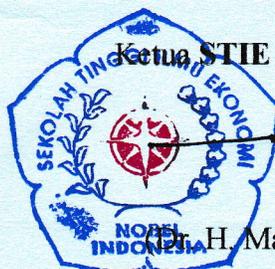
(Dr. Ahmad Firman S.E., M.Si)

Ketua Jurusan

(Yuswari Nur, S.E., M.Si)

Mengetahui,

Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar



(H. Mashur Razak, S.E., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Nama : RESTU DENADA SALAM
NIM : 2015211712
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Bisnis Perbankan dan Keuangan Mikro
Judul : PENGARUH PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN (SPP) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KELURAHAN LANNA KECEMATAN
PARANGLOE KABUPATEN GOWA

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 6 Agustus 2019

Yang menyatakan



Restu Denada Salam

NIM 2015211712

ABSTRAK

Restu Denada Salam. 2019. Pengaruh Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, dibimbing oleh Ahmad Firman.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah sampelnya sebanyak 40 (empat puluh) orang anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dipilih dengan sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Data anggota kelompok SPP dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa observasi, angket dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terstruktur. Data tersebut dianalisis secara statistik, deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dana simpan pinjam perempuan yang telah dilakukan pengelola SPP sesuai dengan pendapatan masyarakat yang telah mendapatkan dana simpan pinjam perempuan. Dapat disimpulkan pula bahwa kinerja pengelola dalam mengatasi permasalahan perencanaan ini cukup baik karena sasaran yang diterapkan cukup tepat bagi masyarakat dan dalam proses pengajuan masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika mengikuti alur perencanaan.

Kata Kunci: *Simpan Pinjam, Kesejahteraan Masyarakat*

ABSTRACT

Restu Denada Salam. 2019. *The Effect of Management of Women's Savings and Loans (SPP) Toward Household Welfare at Lanna Village, Parangloe District, Gowa Regency, supervised by Ahmad Firman.*

The purpose of this research was to describe and explain the management of Women's Savings and Loans (SPP) in improving household welfare at Lanna Village, Parangloe District, Gowa Regency.

This type of research was descriptive qualitative and quantitative research with a total sample of 40 members of the Women's Savings and Loans (SPP) selected with saturated samples, specifically, the entire population was determined as a sample. Data from SPP group members were collected using instruments such as observation, questionnaires, and documentation and developed with structured interviews. The data were analyzed statistically, descriptively and qualitatively using a simple frequency table.

The results of the research indicate that the planning of women's savings and loan that have been carried out by SPP managers is in line with the income of the people who have obtained women's savings and loan. It can also be concluded that the manager's performance in overcoming this planning problem is quite excellent due to the targets applied are quite appropriate for people and in the submission process, they do not feel difficulties when following the planning flow.

Keywords: *Savings and Loans, Household Welfare*

MOTTO

Patience is needed when you want to achieve a success

”Apapun yang terjadi dan seberat apapun beban hidup, jika masih bernafas artinya kita masih beruntung

Maka semangatlah

Jangan lupa untuk bersyukur, berbagi, berbuat baik, berdo’a dan mentaati Allah”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan Hati dan Rasa syukur tiada henti, skripsi ini kupersembahkan untuk Kedua Orang

Tuaku

Tercinta :

Abd. Salam Tunru dan HJ.Sitti Sahara

yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, membimbing dan mendidiku dengan penuh kesabaran serta do'anya yang selalu mengiringi setiap langkahku.

Dan saya juga berterima kasih kepada keluarga besar dari kedua orang tuaku, seluruh dosen, dan teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal/skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”**

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan kelulusan studi pada Program Sarjana (SI) Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini menemui banyak kendala.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., M.Si selaku ketua STIE Nobel Indonesia yang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian.
2. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si selaku Wakil Ketua Bidang Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis.
3. Bapak Yuswari Nur, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen yang telah membantu mempercepat legitimasi penulisan ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.

5. Ibu Andi Widiawati, SE., M.Si selaku Penguji pertama dan Ibu Mariah, SE., M.Pd selaku penguji kedua yang telah memberikan saran dan kritik untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah begitu tulus membekali penulis dengan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga.
7. Yang tersayang Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan do'a, dan kasih sayang serta keluarga besar kedua orang tuaku, dan orang-orang yang kusayangi, yang telah banyak memberikanku semangat hidup serta bantuan moral dan material
8. Untuk sahabatku yang selalu memberikanku semangat dan selalu menghiburku mulai dari teman sekolah dan teman seperjuangan di kampus (Wilda, iken dan Lucitania)
9. Untuk teman KKN-PPM Posko 4 yang selama kurang lebih 1 bulan selalu bersama setiap hari suka dan duka bersama, dan itu semua menjadi salah satu pengalaman yang berharga selama KKN dan membuatku banyak mengerti arti sebuah hubungan
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya tiada lain yang dapat penulis lakukan selain memohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada, sekaligus menyerahkan kepada Allah SWT semoga segala sumbangsih yang begitu tulus dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulisan seluruh pembaca dimasa yang akan datang.

Makassar, 13 Maret 2019

Restu Denada Salam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRA.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Pemberdayaan perempuan.....	15
2.1.2 Teori Koperasi Simpan Pinjam.....	16
2.1.3 Tujuan koperasi Simpan Pinjam.....	17
2.1.4 Prinsip Utama Koperasi Simpan Pinjam.....	18
2.1.5 Simpan Pinjam Bagi Perempuan.....	18
2.1.6 Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan.....	20
2.1.7 Fungsi Manajemen Keuangan dan Fungsi Manajemen.....	34
2.1.8 Tujuan Umum Tentang Kesejahteraan Masyarakat.....	36
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.3 Kerangka Pemikiran	41
2.4 Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	43

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	43
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian	43
3.3 Metode Analisis Data	43
3.4 Populasi dan Sampel	43
3.5 Jenis Data dan Sumber Data.....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data	45
3.7 Teknik Analisis Data	45
3.8 Definisi Operasionl.....	47
3.9 Uji Instrumen.....	48
3.10 Uji Asumsi Klasik	49
3.11 Metode Analisis.....	50
3.12 Uji Hipotesis.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Penelitian	53
4.2 Identitas Responden	62
4.3 Pengawasan	75
4.4 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.....	76
4.5 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Data.....	85
4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	87
4.7 Pembahasan	89
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR LAMPIRAN.....	97

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.4 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Lanna.....	61
Gambar Struktur Kelompok Simpan Pinjam Perempuan	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data.....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	47
Tabel 4.1 Keadaan Jumlah Penduduk Kel. Lanna Menurut Golongan Umur	53
Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	58
Tabel 4.3 pendapatan masyarakat	59
Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	60
Tabel 4.5 Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Kelompok SPP Penerima Dana Program SPP	62
Tabel 4.6 Sosialisasi Tentang Informasi Dana Simpan Pinjam Perempuan	65
Tabel 4.7 Pengetahuan Masyarakat Tentang Simpan Pinjam Perempuan (SPP)..	66
Tabel 4.8 Cara Pengajuan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	67
Tabel 4.9 Administrasi	67
Tabel 4.10 Strategi Pelaksanaan Pembagian Dana	71
Tabel 4.11 Peran Pengelolaan Pembagian Dana	71
Tabel 4.12 Proses Pencairan Dana Kelompok Simpan Pinjam Perempuan.....	72
Tabel 4.13 Proses Pengembalian Dana	73
Tabel 4.14 Pelayanan Pengelolaan.....	73
Tabel 4.15 Jumlah Dana Yang Diberikan Kelompok SPP.....	74
Tabel 4.16 Kinerja Pelaku Pengelola SPP Dalam Pemantuan Dan Pengawasa ...	78
Tabel 4.17 Permasalahan Penggunaan Dana Pada Kelompok SPP	79
Tabel 4.18 Peran Pengelola Dalam Menghadapi Setiap Permasalahan.....	79
Tabel 4.19 Pelatihan Penggunaan Dan Dalam Penyelesaian Permasalahan	80
Tabel 4.20 Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Dana SPP.....	82

Tabel 4.21 Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Kesejahteraan.....	84
Tabel 4.22 Hasil Uji Validitas.....	85
Tabel 4.23 Hasil Uji Reliabilitas.....	86
Tabel 4.24 Hasil Uji Normalitas.....	87
Tabel 4.25 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	88
Tabel 4.26 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana.....	89
Tabel 4.27 Hasil Pengujian Hipotesis.....	90
Tabel 4.28 hasil uji koefisien determinasi.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- 1 Surat Izin Penelitian
- 2 Surat Keterangan Dan Tempat Penelitian
- 3 Hasil Kuesuoner Penelitian
- 4 Data Responden
- 5 Hasil Uji Validitas
- 6 Hasil Uji Realibilitas
- 7 Hasil Uji Regresi Sederhana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kedamaian abadi dan kesejahteraan social.

Upaya mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional harus dilaksanakan disegala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuann, dan teknologi serta sektor keamanan. Guna mencapai semuanya itu diperlukan peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan politik dibidang kesejahteraan (public welfare). Edi suharto, (2005:12).

Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program keluarga berencana, pengucuran dana inpres pendidikan, kesehatan, perbaikan sarana, dan prasarana transportasi. Ada berbagai program yang berskala nasional

yang bertujuan untuk melaksanakan investasi bagi penanggulangan masalah kemiskinan seperti jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), inpres desa tertinggal (IDT). Pada tanggal 30 juni 1999, badan perencanaan pembangunan nasional (deputi kepala bappenas bidang regional dan daerah) selaku ketua tim pengarah P3DT/PPK pusat, mengeluarkan surat nomor 4079/D.V/06/99 mengenai pedoman umum bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) tahun anggaran 1999/2000 dengan mengelokasikan sejumlah 250 kecamatan yang tercakup dalam 117 kabupaten di 20 provinsi. Pedoman dalam pelaksanaan PPK berisi tujuan dan sasaran kelompok, serta lokasi PPK; mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan; dan bagaimana sumber dana, alokasi dana serta penyaluran dana. Hessel Nogi S.Tangkilisan, (2004:2).

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan masyarakat dipedesaan, dan juga untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Selain Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 juga mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) yang terdiri dari PNPM mandiri pedesaan, PNPM mandiri perkotaan, serta PNPM mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Tim koordinasi (PTO), PNPM MP, (2007:2) pendekatan PNPM mandiri merupakan pengembangan dari Program pengembangan (PPK) yang selam ini berhasil. Beberapa keberhasilan program pengembangan kecamatan (PPK) adalah berupaya penyediaan lapangan kerja dan

pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Sasaran program ini ialah kecamatan parangloe kabupaten gowa yang dinilai paling miskin di Indonesia diantaranya termasuk salah satu yang masuk dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) simpan pinjam perempuan (SPP) karena lapisan masyarakatnya yang beragam dari mulai petani, pedagang, pejabat ataupun sopir yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup, akan tetapi lahan pertanian dalam kelurahan tersebut sudah sempit sehingga untuk memenuhi kebutuhan dari sekian banyak profesi diatas maka pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam pada bank sebagai modal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang. Yang dimaksud dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di

kelurahan upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan. Banyak masyarakat kelurahan Lanna yang berdagang kecil-kecilan terlebih lagi kaum perempuan atau ibu-ibu. Berdagang dilakukan guna membantu perekonomian keluarga supaya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari.

Adanya simpan pinjam perempuan (SPP) suku bunganya yang lebih rendah dari pada bank, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan dan juga dapat meningkatkan taraf hidup serta menunjang perekonomian negara. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mempunyai sistem Tanggung Renteng apabila terjadi Wanprestasi.

Adapun persyaratan menjadi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yakni: kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun, mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati, telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota, kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik dan mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. (Penjelasan IV Kegiatan SPP, BAPEMMAS.2007).

1. Bukti usaha dalam koperasi simpan pinjam

Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan

anggaran dasar koperasi, kemudian Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam agenda pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan kepada seluruh calon anggota sehingga memiliki persepsi yang sama. Mendirikan sebuah koperasi jumlah minimal anggotanya adalah 20 orang. Dalam proses pendiriannya awali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan koperasi di wilayah setempat.

Ada beberapa poin penting yang wajib dibicarakan dalam rapat pembentukan koperasi tersebut antara lain: kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi dan bidang usaha yang dilakoni, keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola, membahas tentang permodalan, jangka waktu serta sisa hasil usaha.

Hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan akta pendirian ke notaris. Melalui notaris atau kuasa pendiri, berkas ijin pendirian koperasi simpan pinjam tersebut diajukan ke pejabat yang berwenang untuk dievaluasi. Beberapa bukti tertulis yang wajib dilampirkan antara lain berupa salinan akta pendirian bermaterai, akta pendirian yang telah ditandatangani notaris, surat bukti tersedianya modal,

rencana kegiatan usaha kurang kurangnya untuk 3 tahun ke depan, dan RAPB.

2. Program pengembangan kecamatan

Paradigma pembangunan sebelum adanya inpres no 5 th 1993 masih dilakukan secara top down melalui dinas dan instansi terkait. Untuk mewujudkan pengurangan masyarakat miskin pemerintah membuat program yang dananya diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui program IDT dengan ditetapkannya Inpres no 5 th 1993. Indikator Keberhasilan IDT adalah bila dana bantuan langsung masyarakat (BLM) diterima langsung oleh masyarakat secara utuh dengan tidak ada potongan. IDT dievaluasi dan ditemukan bahwa kebutuhan masyarakat untuk terentaskan dari kemiskinan tidak hanya dengan tambahan modal usaha bagi warga masyarakat. Akan tetapi yang dibutuhkan masyarakat adalah juga tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi.

Dengan inpres yang sudah ada itu diluncurkan program P3DT untuk kegiatan sarana dan prasarana IDT dan P3DT dievaluasi ternyata masih perlu ada penyempurnaan proses pembangunan di masyarakat dengan menggunakan sistem pembangunan partisipatif yang selama ini telah dilakukan melalui musbangdes dan UDKP. Dari IDT dan P3DT diluncurkanlah PPK dengan dasar hukum inpres no 5 th 1993 tersebut. Inpres no 5 th 1993 meliputi tiga komponen:

1. Bantuan modal usaha
2. Bantuan Pendampingan

3. Bantuan pembangunan prasarana Pendukung Desa Tertinggal P3DT .

Model PPK diluncurkan karena:

1. Penanggulangan Kemiskinan Tidak Dapat Dilakukan Secara Sepotong-Sepotong
2. Masyarakat Bukan Obyek Pembangunan
3. Birokrasi Pembangunan di Kecamatan kebawah kurang diberi kesempatan

Tujuan PPK

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi
4. Membangun prsarana dan sarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi
5. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dan aparat pemerintah untuk memfasilitasi proses pemberdayaan Sasaran adalah tujuan antara Untuk mencapai tujuan maka sasaran harus dicapai lebih dahulu. Karena apabila sasaran sudah dicapai maka tujuan akan tercapai juga.

Sasaran yang ingin dicapai dari PPK adalah:

1. Sasaran Bidang Ekonomi
 - a. Tumbuhnya usaha usaha ekonomi produktif di pedesaan, seperti industri kecil, perdagangan, usaha peternakan, usaha perikanan, pertanian.
 - b. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi , seperti irigasi, jalan , pasar dan sejenisnya.
 - c. Tersedianya likuiditas keuangan milik masyarakat di kecamatan yang mendukung kegiatan ekonomi
2. Sasaran Bidang Pelembagaan manajemen pembangunan
 - a. Tersusunannya Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) dan tersusunnya Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) melalui diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkualitas.
 - b. Adanya rasa keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan dana pembangunan.
 - c. Adanya control masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan masyarakat desa.
 - d. Berperannya masyarakat dalam menentukan jenis kegiatan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta pemantauan pelaksanaan pembangunan didesanya.

3. Pengembangan pengelolaan Dana bergulir PNMP

Dana bergulir merupakan dana abadi milik masyarakat yang di kelola oleh masyarakat melalui kegiatan perguliran simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP). Pengelola dana bergulir adalah unit pengelola kegiatan (UPK). Saat ini kegiatan perguliran SPP telah berjalan dan melayani masyarakat lebih dari 5tahun. Secara umum asset kegiatan dana bergulir rata – rata setiap kecamatan mencapai lebih dari 2 milyar rupiah. Kegiatan dimaksud telah melayani rata – rata 150 kelompok SPP di setiap kecamatan seluruh Indonesia

➤ Tujuan Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan :

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program;
3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
5. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

➤ **Sasaran Kegiatan Dana Bergulir**

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah :

1. Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
2. Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
3. Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

Agar penelitian ini benar-benar menyentuh fenomena yang diteliti, maka diberikan ruang lingkup di dalam penelitian ini diantaranya dengan memunculkan variable penelitian. Variabel penelitian adalah objek yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dicari informasinya dengan tujuan untuk ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono,2007;21)

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa, maka penulis akan memberikan batasan-batasan tentang apa yang harus diketahui menyangkut tentang evaluasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaaan (PNPM-MP) (Study kasus pada simpan pinjam bagi perempuan (SPP) Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Tahun 2013-2014) yang berpedoman pada teori-teori yang digunakan dan

disesuaikan dengan konsep masalah yang diteliti. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengenai Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe.

Fenomena yang menarik pada rumah tangga (masyarakat) miskin dalam mempertahankan hidup dengan tingkat kehidupan yang layak, yaitu *pertama* pada sisi pengeluaran melakukan penghematan pada pengeluaran yang dirasakan dapat ditunda, pengeluaran – pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi sedapat mungkin dihindari atau dikurangi. Kedua, pada sisi pendapatan rumah tangga pada rumah tangga miskin telah memaksa mereka untuk melakukan pengoptimalan pendapatan melalui pengerahan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Upaya ini dilakukan untuk tetap mempertahankan tingkat kesejahteraan atau kehidupan yang layak. Namun demikian upaya ini tidak semuanya mampu untuk dapat mempertahankan pada tingkat kehidupan yang layak (Sugeng, 2008).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lanna Kabupaten Parangloe. Sementara itu salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat adalah dengan

membentuk sebuah program pemberdayaan masyarakat yang bernama program nasional kesejahteraan masyarakat namun dalam fenomena justru sebaliknya, bagaimana pengelolaan dana simpan pinjam perempuan SPP dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat di kelurahan banyak mengalami hambatan dan kendala dalam hal pengembalian uang dari para kelompok Simpan Pinjam Perempuan SPP antara lain: Pembayaran telat atau tidak sesuai dari jadwal yang ditentukan dalam musyawarah, kelompok Simpan Pinjam Perempuan SPP tidak mau membayar atau karena belum ada uang.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Pengaruh Pengelolaan program Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe*”.

Tabel 1.1 Jumlah data Return On Asset (ROA)

No	Tahun	Jumlah	%
1	2015	320.519.000	3.03
2	2016	367.095.500	3.05
3	2017	441.271.500	3.11
4	2018	476.391.841	3.44

Sumber data : hasil olahan kuesioner, Mei 2018

Berdasarkan data tersebut kategori lancar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena kemajuan usaha sebagian besar sehingga mendorong dan mendukung kemampuan masyarakat kelurahan Lanna kecamatan Parangloe meningkat sangat pesat,

maka dari itu pihak yang terkait atau masyarakat harus meningkatkan kesejahteraan dalam hal terhadap pengelolaan dana simpan pinjam (SPP).

Berdasarkan pada tabel di atas, besar Return on Asset (ROA) pada Kelurahan Lanna tingkat persen (%) pada tahun 2015 3.03% sampai pada tahun 2018 kembali mengalami signifikan naik sebesar 3.44%

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka terdapat rumusan masalah pokok yaitu:

Apakah pengelolaan program dana simpan pinjam perempuan (SPP) berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui pengelolaan program dana simpan pinjam untuk perempuan (SPP) terhadap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kantor Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pihak Kelompok SPP maupun kepentingan akademik.

a. Bagi Penulis

Tambahan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai gelar strata satu (S1)

b. Bagi STIE Nobel Indonesia Makassar

Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa STIE NOBEL INDONESIA pada umumnya dan referensi skripsi, serta pendalaman ilmu pengetahuan.

c. Bagi Kelompok SPP

Menjadi masukan bagi Kelompok SPP Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa tentang pengelolaan program dana simpan pinjam untuk perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori pemberdayaan perempuan

2.1.1 Pengertian pemberdayaan perempuan

Konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi tim perumus strategis pembangunan nasional Riant Nugroho, (2008) mengemukakan ada empat indikator pemberdayaan :

- a. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif dalam lingkungan.
- b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- c. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut.
- d. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara Profesor Gunawan yang dikutip Riant Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan yaitu:
 - 1) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.

- 2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
 - 3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.
- Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya , kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

2.1.2 Teori koperasi simpan pinjam

Menurut Hendrojogi (2008:1) “koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”. Arti dari koperasi menurut Eko Teko Sumadiwirjo (2008:1) “koperasi adalah sebuah perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum dengan jalan atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama, menyelenggarakan produksi, pembelian atau penjualan barang dan jasa untuk kepentingan anggotanya. 17 Menurut Melayu SP Hasibuan (2008:1) simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam didirikan bertujuan

untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang, dengan jalan menggiatkan tabungan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya, koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.

2.1.3 Tujuan koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup hemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Menurut UU no.25 tahun 1992 pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Manajer koperasi simpan pinjam juga seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki keterampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi

dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU No.25 tahun 1992.

2.1.4 Prinsip utama koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam memiliki tiga prinsip utama :

1. Swadaya pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya.
2. Setia kawan pengertian koperasi setia kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggotanya
3. Pendidikan dan penyadaran 19 Pengertian koperasi pendidikan dan penyadaran adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama, jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman.

2.1.5 Simpan pinjam bagi perempuan

Menurut Ninik sudarwati (2003:1) mengatakan “simpan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”. Menurut Umar Burhan (1989:1) “simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpan pinjam dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah disepakati”. Banyak hal yang terkait dengan ekonomi yang menyebabkan perempuan tak di akui perannya karena kiprahnya hanya seputar ekonomi keluarga dan rumah tangga. Trudgil

(2012:1) mengemukakan bahwa “ perempuan lebih sering menggunakan ragam bahasa prestise dibandingkan dengan laki-laki,sebagian disebabkan mereka lebih sadar status dan lebih peka terhadap arti penting sosial bahasa”. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan Rumah Tangga Miskin.

1. Adapun tujuan khusus dari SPP adalah :
 - a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun social dasar
 - b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi ruma tangga melalui pendanaan peluang usaha
 - c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan
 - d. Ketentuan dasar:
2. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan
 - a. Keterlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman
 - b. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan

pelestarian dan pengembangan dana, dalam guna meningkatkan kesejahteraan

- c. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan
- d. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga agar dapat membantu perekonomian keluarga dan sebagai pengisi waktu luang sebagai ibu rumah tangga.

2.1.6 Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1. pengertian dana simpan pinjam perempuan

Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerja sama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi. Satu yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerja sama dengan orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau

pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah pendapat beberapa para ahli yakni Rita Mariyana (2010) pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang direncanakan sebelumnya.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengertian pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan SPP maka perlu diukur melalui empat indikator Kualitas, kuantitas, dampak, waktu.

1. Kualitas adalah indikator ini menunjukkan standar kualitas dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Misalnya apakah pelayanan

kegiatan simpan pinjam perempuan sudah memenuhi syarat dalam hal keramahan, dan sikap empati terhadap kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

2. Kuantitas adalah jumlah pendapatan yang diperoleh anggota kelompok selama mengikuti kegiatan SPP tersebut.
3. Dampak adalah kegiatan SPP yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan di masyarakat melalui jenis usaha yang dijalankan.
4. Waktu adalah ketepatan waktu kelompok SPP dalam melaksanakan kegiatan SPP tersebut selama 1 tahun

Dana merupakan alat yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap pengelolaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya,

Dana adalah uang, surat berharga, serta harta lainnya yang sengaja disisihkan bagi suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan, menurut Kasmir (2008:17) dana adalah:

1. Dana dianggap sebagai kas.
2. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro dan tabungan.
3. Dana sebagai modal kerja.
4. Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang memiliki perusahaan.
5. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas.

Menurut mariohot manullang, Dearlina Sinaga (2005:3) dana adalah alat yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-

hari. dana adalah jumlah dana yang dihimpun dalam periode tertentu yang dikelompokkan dalam dana berbiaya dan tidak berbiaya.

Menurut Melayu SP Hasibuan (1996) simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut biaya dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat. Jadi simpan pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang.

Menurut Ninik Widiyanti (2003) simpan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Koperasi simpan pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan pinjaman modal kepada koperasi, sehingga anggota koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan. Dalam memberikan pinjaman koperasi simpan pinjam pembimbing anggotanya dalam mempergunakan uang yang mereka pinjam. Mereka didik untuk mengatur keuangan anggota agar menggunakan modal dengan sebaik-baiknya.

Menurut Hendrojogi (2004) adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social beranggotakan orang-orang atau bahan hukum koperasi

yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang berarti bekerja sama yang berasal dari kata *Co* yang berarti bersama-sama dan *Operation* yang berarti bekerja dan kata asing itulah berkembang menjadi bahasa Indonesia yaitu Koperasi. Jadi koperasi mulai berlakunya UU Koperasi No 78 Tahun 1958. Koperasi sebagai lembaga ekonomi oleh para ahli di beri pembatasan atau definisi sebagai berikut:

Menurut Eko Teko Sumadiwirjo (1989:71) dalam bukunya “Koperasi” dan artinya bagi masyarakat Indonesia koperasi adalah sebuah perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum dengan jalan sama atas dasar sukarela serta hak tanggung jawab yang sama, menyelenggarakan produksi, pembelian atau penjualan barang dan jasa untuk kepentingan anggota.

Berdasarkan Bab III bagian 2 UU No 12 1967 fungsi koperasi adalah:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasi ekonomi nasional.
3. Sebagai salah satu perekonomian bangsa Indonesia Azas koperasi

Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Simpan pinjam perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan/kelurahan,

kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan pendorong penanggulangan rumah tangga miskin (RTM) dan juga memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha. (Penjelasan IV PTO kegiatan SPP, BAPEMMAS.2007).

3. Pengertian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari SPP sebagai berikut:

- a) Tujuan umum Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. 36
- b) Tujuan khusus adapun tujuan khusus dari SPP adalah:
 1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
 2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.

3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Sasaran, bentuk kegiatan dan ketentuan kelompok SPP

a) Sasaran program Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. BPS menyebutkan bahwa penentuan rumah tangga miskin didasarkan atas kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan atau non makanan. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan. Secara konseptual penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non-makanan, atau setara Rp 120.000,00 per orang per bulan. 37 bila diasumsikan suatu rumah tangga memiliki jumlah anggota rumah tangga (house hold size) rata-rata 4 orang, maka batas kemiskinan rumah tangga

1. Rumah tangga dikatakan sangat miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 4×120 ribu = Rp 480.000,00 per rumah tangga per bulan.

2. Rumah tangga dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4 x 150 ribu = Rp 600.000,00 per rumah tangga per bulan, tetapi di atas Rp 480.000,00.
 3. Rumah tangga dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4 x 175 ribu = Rp 700.000,00 per rumah tangga per bulan, tetapi di atas Rp 600.000,00 (Wrihatnolo.blogspot.com/2008/08, diakses 28 Januari 2014)
- b) Bentuk kegiatan bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.
- c) Ketentuan kelompok SPP
1. Kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun.
 2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
 3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.

4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik. 38
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana (Penjelasan IV PTO kegiatan SPP, BAPEMMAS. 2007).

Indikator keberhasilan pemberdayaan terhadap perempuan yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004:146) adalah:

1. Meningkatnya kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipan aktif (subyek) agar tidak sekedar menjadi obyek pembangunan.
2. Meningkatkan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap program pembangunan, baik perencana, pelaksana, maupun pemantauan dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industry kecil maupun besar untuk menunjang kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.

Simpan pinjam perempuan adalah penyediaan uang kepada anggota kelompok oleh pengurus kelompok dan pemberian kepercayaan kepada anggota berupa pinjaman uang yang akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memberikan bunga/imbalan jasa. Dikatakan kepercayaan sebab seorang yang memperoleh pinjaman telah dianggap

mampu menggunakan dan dapat mengembalikan. (Materi pelatihan KPMD MP, draft bumi Wiyata 291207,2011).

Manfaat pinjaman yaitu:

1. Menambah modal untuk membiayai usaha produktif anggota.
2. Memperoleh sarana produksi secara kontinyu.
3. Memperoleh tambahan modal selain dari dana yang sudah ada.
4. Memperluas ataupun memperkaya usaha produktif yang sudah ada maupun membuat usaha baru.

Jenis-jenis pinjaman yaitu:

1. Pinjaman investasi yaitu pinjaman yang digunakan untuk usaha yang hasilnya tidak segera dapat dinikmati.
2. Pinjaman modal kerja yaitu pinjaman yang digunakan untuk usaha yang hasilnya segera dinikmati.
3. Pinjaman konsumtif yaitu pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Syarat pengajuan pinjaman:

1. Anggota baru harus terdaftar dalam keanggotaan.
2. Anggota harus mempunyai tabungan di kelompok
3. Anggota harus memahami ketentuan – ketentuan pinjaman sebagaimana yang termuat dalam AD/ART
4. Memiliki usaha produktif yang memerlukan bantuan permodalan.

5. Jaminan pinjaman/kredit

- a. Kredit diberikan tanpa jaminan fisik
- b. Tabungan anggota merupakan sebagian dari jaminan
- c. Tanggung bersama (tanggung renteng)

Sistem tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama semua anggota kelompok untuk memenuhi kewajiban kredit dari pihak luar sebagai perwujudan paling tinggi dari rasa kepercayaan antara anggota dan rasa memiliki terhadap kelompok, manfaatnya dapat memperkokoh kekompakan kelompok ke dalam dan kepada pihak luar, karena tanggung jawab bersama membutuhkan kontrol sosial dan solidaritas yang kuat antar anggota.

Jenis – jenis tabungan / simpanan yaitu:

1. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayar waktu seseorang masuk/diterima menjadi anggota kelompok. Karena diharapkan bias menjadi “pokok”, maka biasanya agak lebih besar. Karena agak lebih besar, maka biasanya kelompok membuat kebijakan bahwa simpanan pokok dapat diangsur dalam beberapa bulan.
2. Simpanan wajib adalah kewajiban anggota setiap bulan/periode yang disepakati dalam kelompok. Artinya bahwa tabungan itu harus dibayar secara rutin dan teratur dalam jumlah yang ditentukan. Penentuan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib harus didasarkan kemufakatan bersama, biasanya memakai standar kemampuan terendah anggota.
3. Simpanan sukarela adalah tabungan yang bebas, baik besaran maupun waktu setornya sesuai dengan kemampuan anggota masing – masing. Jenis

simpanan ini harus didorong agar permodalan kelompok tumbuh dengan baik dan dapat melayani kebutuhan pinjaman anggota.

Anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yaitu anggaran besar (AD) adalah landasan dan pedoman kerja yang disahkan oleh seluruh anggota kelompok dan ditetapkan atas dasar musyawarah.

Anggaran rumah tangga (ART) adalah pelengkap AD, merupakan peraturan yang lebih terperinci, lengkap, dan operasional. Pada dasarnya ART merupakan uraian dari AD.

Tujuan AD-ART dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kelompok. Dengan adanya AD-ART yang jelas dan tegas, maka penyimpanan-penyimpanan yang terjadi akan mudah dihindari, sehingga kelompok dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Syarat – syarat menjadi anggota kelompok yaitu :

1. Punya kartu tanda pengenal (KTP) yang berlaku
2. Berasal dari dusun / RT setempat
3. Mempunyai usaha yang sementara aktif (surat keterangan dari desa / kelurahan)
4. Tidak mempunyai pinjaman dari lembaga keuangan (bank, koperasi, dll)
5. Jujur
6. Bertanggung jawab

Kewajiban anggota kelompok yaitu :

1. Menghadiri rapat anggota.
2. Menabung secara teratur yaitu melalui tabungan wajib dan sukarela.
3. Membayar angsuran dan bunga pinjaman.
4. Mencari anggota – anggota baru.

Hak – hak anggota kelompok yaitu :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam pertemuan anggota atas dasar satu suara untuk setiap satu anggota.
2. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau badan pemeriksa.
3. Meminta diadakan pertemuan khusus bila di anggap perlu.
4. Mengemukakan pendapat atau saran – saran kepada pengurus di luar pertemuan, baik diminta atau tidak.
5. Mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang sama.
6. Melakukan pengawasan atas jalannya perkumpulan dan usaha – usaha kelompok menurut ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok.

Administrasi kelompok adalah pencatatan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan keadaan dan perkembangan kelompok. Tujuannya adalah

- a. Sebagai alat kontrol
- b. Sebagai alat dokumentasi
- c. Sebagai alat/bahan pengambilan keputusan

- d. Sebagai alat untuk memonitor perkembangan kelompok
- e. Sebagai alat untuk evaluasi
- f. Sebagai alat untuk memupuk kepercayaan anggota

Jenis – jenis administrasi yaitu

a. Administrasi organisasi

Yaitu segala pencacatan yang berkaitan dengan organisasi secara umum. Administrasi ini umumnya dikerjakan oleh sekretaris. Beberapa buku yang di perlukan antara lain:

1. Buku daftar anggota
2. Daftar hadir pertemuan
3. Buku daftar pengurus
4. Buku notulen pertemuan
5. Buku tamu
6. Buku bimbingan, dsb.

b. Administrasi keuangan

Yaitu pencatatan soal – soal yang berkaitan dengan kekayaan kelompok. Model pembukuan yang digunakan kelompok adalah model yang sederhana, mudah dikerjakan dan mudah dipahami sehingga diharapkan akan sangat membantu pengurus / bendara dalam mempertanggung jawabkan keuangan dan diharapkan pula banyak anggota yang biasa mengerjakan dan memahaminya.

Beberapa buku yang diperlukan antara lain adalah :

- a. Buku kas harian (berikut bendelan bukti – bukti otentik transaksi)
- b. Buku tabungan anggota
- c. Buku pinjaman / kredit anggota
- d. Laporan rugi laba
- e. Neraca

2.1.7 Fungsi Manajemen Keuangan Dan Fungsi Manajemen

- a. Fungsi pokok manajemen keuangan antara lain menyangkut keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen pada suatu perusahaan. Pokok manajer keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

- b. Fungsi manajemen terdiri atas 4 fungsi, yaitu :

1. Planning (fungsi perencanaan)

Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang di inginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada beberapa aktivitas dalam fungsi perencanaan :

- a. Menetapkan arah tujuan serta target bisnis
- b. Menyusun strategi dalam pencapaian tujuan dan target tersebut.
- c. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan.
- d. Menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan dan target bisnis.

2. Organizing (fungsi pengorganisasian)

Organizing adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengorganisasian pengelompokan semua orang alat, tugas dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

3. Directing (pengarahan)

Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju yang telah ditetapkan. Fungsi pengarahan mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Memberikan tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan.

4. Controlling (pengendalian)

Controlling adalah serangkaian proses pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak.

2.1.8 Tujuan Umum Tentang Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian tingkat kesejahteraan

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan hidup yang dipersepsi masyarakat dan latar belakang budaya, mengingat tingkat kelayakan ditentukan oleh persepsi normatif suatu masyarakat atas kondisi sosial, material, dan psikologis tertentu.

Menurut undang-undang No. 11 tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari undang-undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Menurut konsep lain, kesejahteraan bisa diukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Kemudian masalah kerentanan (*vulnerability*), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat

seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (*recover*). Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi, bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai arena atau profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.
 - a. Ada beberapa indikator keluarga tingkat kesejahteraan berdasarkan menurut widyastuti (2012), yaitu:
 - a. Jumlah Pendapatan
 - b. Tingkat pendidikan semakin tinggi dan berkualitas
 - c. Kesehatan anggota
 - a) jumlah pendapatan

Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan. Semakin tinggi pendapatan yang di dapatkan semakin akan meningkatkan standar kehidupan rumah tangga.

b) pendidikan yang semakin tinggi dan berkualitas

Pendidikan sangat berpengaruh positif juga terhadap promosi pertumbuhan ekonomi karena akan lahir tenaga-tenaga kerja yang ulet, terampil dan terdidik sehingga sehingga bermanfaat untuk pembangunan ekonomi karena mempunyai SDM yang tidak perlu diragukan. Dalam pendidikan ini terdapat tiga jenis indikator yang digunakan untuk pendidikan yang meliputi, tingkat pendidikan anggota rumah tangga, ketersediaan pelayanan pendidikan, dan penggunaan layanan pendidikan tersebut.

c) kualitas kesehatan yang semakin baik.

Untuk dapat meningkatkan kesehatan dan standar hidup rumah tangga ada empat jenis indikator yang digunakan, yang meliputi status gizi, status penyakit, ketersediaan pelayanan kemiskinan, dan penggunaan layanan-layanan kesehatan tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pengaruh antar variabel yang dibangun dalam penelitian ini mengacu pada temuan peneliti terdahulu, yang secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 peneliti terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Tahun penelitian	Hasil penelitian dahulu
Febrilia Ika A	Peranan bantuan modal PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Banyuurip , Kec Banyuurip, Kab. Purworejo	2012	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan bantuan modal PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan usaha
Sarwono	EFEKTIVITAS PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI	2009	program SPP memberikan Efektivitas Program Simpan dampak yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja peserta program.

	PERDESAAN DI KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG		
Yulihardi	ANALISA PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERGULIR SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PROGRAM PNPM-MP DI KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN	2013	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan besarnya pemberian pinjaman dana bergulir SPP Terhadap peningkatan pendapatan anggota kelompok SPP di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Sumber : berbagai jurnal dan penelitian

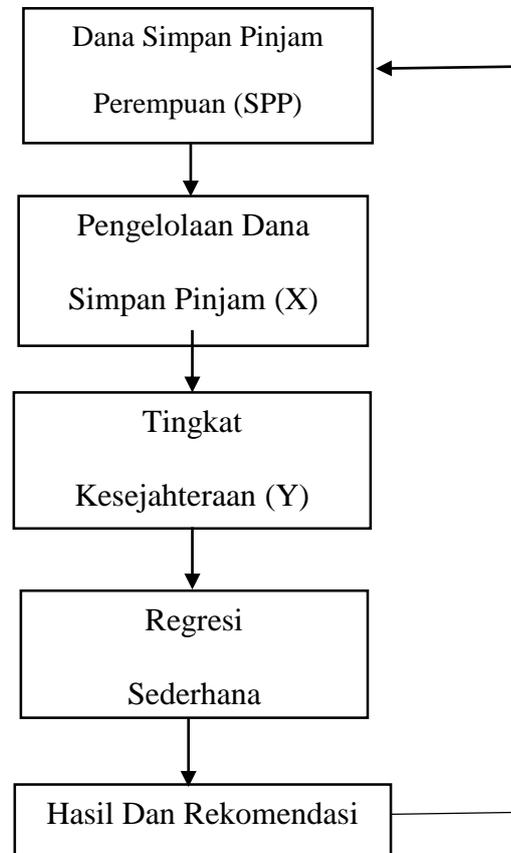
2.3 Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, kesenjangan antara wilayah. Persolan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja dikelurahan upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

Dengan adanya simpan pinjam perempuan (SPP), maka masyarakat dapat memperoleh manfaat yaitu untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan/kelurahan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan juga memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha dan juga mendorong penguatan kelembangan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Namun untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perempuan tersebut diperlukan pengolahan yang baik dan benar yaitu pengolahan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi sehingga tercipta kesejahteraan, baik dalam kelompok maupun masyarakat. Mengenai alur pemikiran peneliti dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.4



2.4 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₀ = tidak ada pengaruh pengelolaan dana simpan pinjam perempuan (SPP) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kelurahan Lanna kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

H₁ = ada pengaruh pelaksanaan program simpan pinjam bagi perempuan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kelurahan lanna kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Proses penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) bulan, mulai dari januari-maret 2019.

3.2 Tipe Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian survei langsung ke objek penelitian dengan tipe deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai berbagai macam dana yang telah di kumpulkan dari objek penelitian (lapangan) yang berkaitan dengan masalah tentang pengelolaan dana simpan pinjam perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kantor lurah lanna kecamatan parangloe gowa.

3.3 Metode Analisis Data

Untuk mengadakan pengujian terhadap hipotesis ini dan menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menggunakan analisis data sebagai berikut.

3.4 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh anggota SPP di kelurahan lanna kecamatan parangloe kabupaten gowa populasi yang digunakan adalah keseluruhan kelompok SPP yang berjumlah 5 kelompok yang terdiri 40

orang. Jadi penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian studi populasi karena menggunakan keseluruhan kelompok SPP.

2. Sampel

Arikunto (1997 : 120) mengemukakan, bahwa apabila populasi kurang dari 100, maka sebaiknya semua anggota populasi tersebut dijadikan sampel. Melihat jumlah populasi kelompok SPP kelurahan lanna kecamatan parangloe kabupaten gowa yang berada di bawah angka 100, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada (sampel jenuh). Populasi nya berjumlah 40 orang yang dijadikan sampel penelitian yang berdasar pada pendapat di atas.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

1. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang di jadikan dasar dalam memecahkan permasalahan yang ada
2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang kemudian diolah dan dibuatkan suatu interpretasi dalam upaya menjawab permasalahan yang ada.

3.5.2 Sumber Data

1. data primer yaitu data hasil penelitian yang diperoleh melalui pengisian kuesioner/angket, wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama. Data sekunder ini bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi atau berhubungan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu suatu cara mengumpulkan data melalui pengamatan indrawi, dengan melakukan pencatatan terhadap gejala – gejala yang terjadi pada objek penelitian secara langsung di kantor lurah lanna kecamatan parangloe kabupaten gowa.
2. kuesioner yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan bersifat tertutup kepada responden yang bersangkutan dengan setiap pertanyaan disediakan pilihan jawaban, sehingga responden bersangkutan tinggal memilih salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan pertanyaan.
3. wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap responden guna mendapatkan/memperoleh hal – hal yang penting dari responden secara mendalam.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dari hasil penelitian pengelolaan program dana simpan pinjam untuk perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan lanna kecamatan parangloe kabupaten gowa ini, baik yang diperoleh dengan data primer maupun data sekunder dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan didukung table frekuensi yang sederhana dan beberapa

variabel pendukung dijadikan indikator dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan analisis yang dipakai penulis:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk table numerik.

Menurut Mudjijat Kuncoro (2009) statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan karakteristik responden dan tanggapan responden terhadap variabel penelitian.

2. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Jadi statistik inferensial membantu peneliti untuk mencari tahu apakah hasil yang diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasi pada populasi.

3.8 Definisi Operasional

1. Pengelolaan Dana SPP adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan kelompok/organisasi yang telah ditentukan.
2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan hidup.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Konsep variabel	Indikator	Skala
pengelolaan dana simpan pinjam perempuan (spp) (X).	suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan kelompok/organisasi yang telah ditentukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan 2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan 3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha <p><u>Menurut : sedarmayanti (2004 : 146)</u></p>	Ordinal
Tingkat kesejahteraan (Y)	Tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan 2. Tingkat pendidikan semakin tinggi 3. Kesehatan anggota <p><u>Menurut : widyastuti, 2012</u></p>	Ordinal

	sosialnya. Dari Undang–Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.		
--	--	--	--

3.9 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Untuk mendapatkan instrumen yang valid maka dilakukan uji validitas. Menurut Sugiyono (2013), alat ukur dikatakan valid apabila alat ukur tersebut dapat mengukur obyek yang seharusnya diukur.

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan cara validitas konstruk, yakni menyusun tolak ukur operasional dari kerangka suatu konsep dengan cara pemahaman atau logika atas dasar pengetahuan ilmiah. Isi kuesioner disesuaikan dengan konsep dan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli.

Kriteria yang digunakan dalam menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis adalah :

- a. Apabila koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30. Maka valid, demikian sebaliknya (Saifuddin Azhar 1997 dalam Syahrudin dkk (2015 : 37).

- b. Jika nilai korelasinya signifikan maka indikator pertanyaan dinyatakan valid, demikian sebaliknya (Gozali 2002 dalam Syahrudin dkk 2015 : 37).

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sujoko Efferin (2008) dalam Syahrudin dkk (2015 : 41), reliabilitas data adalah sejauh mana konsistensi kategoritas data jika dilakukan oleh peneliti yang lain atau boleh peneliti yang sama dalam kejadian yang berbeda.

Uji reliabilitas pada suatu penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha* (Riduwan 2008 dalam Syahrudin dkk 2015 : 41), kriteria yang digunakan untuk menyatukan suatu instrumen dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* (α) lebih besar dari pada 0,60 (Ghozali 2001 dalam Syahrudin dkk 2015 : 41).

3.10 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji persyaratan analisis data yakni uji normalitas. Jika dilihat dari kata dasarnya “normal”, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak.

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni :

- a. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.
- b. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal..

3.11 Metode Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2015 : 238). Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pengaruh pengelolaan dana simpan pinjam perempuan (X1) terhadap tingkat kesejahteraan (Y) dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana simpan pinjam perempuan (X1) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y), maka nilai tanggapan yang diperoleh kuesioner dibobotkan berdasarkan *likert scale*

2. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono 2015 : 240). Adapun alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah regresi liner sederhana, ini digunakan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan dana simpan pinjam perempuan (X) terhadap tingkat kesejahteraan (Y). Persamaan hubungan linier dengan lebih baik dari satu variabel, sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Tingkat kesejahteraan

X_1 = pengelolaan dana simpan pinjam perempuan

a = konstanta

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor.

3.12 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial (masing-masing).

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan mengetahui pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan (Bersama-sama).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui berapa besar kemampuan variabel independen (X) menjelaskan variabel terikat (Y), dapat dilihat dari koefisien determinasi berganda (R^2). Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Bila nilai R^2 mendekati 0, berarti sedikit sekali variasi variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Jika nilai R^2 bergerak mendekati 1, berarti semakin

besar variasi variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel dependen. Jika ternyata dalam perhitungan nilai R^2 sama dengan 0, maka ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak bisa dijelaskan oleh variabel independen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Kelurahan Lanna adalah merupakan ibu kota kecamatan Parangloe dan salah satu kelurahan dari 2 kelurahan dan 5 desa wilayah kecamatan Parangloe, dibentuk pada tahun 1980 berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 140-502, tanggal 22 September 1980, tentang penetapan desa menjadi Kelurahan. Penamaan kelurahan lanna adalah berasal dari nama Karaeng Lanna yang menurut legenda salah satu tokoh masyarakat. Dalam masa terbentuknya menjadi kelurahan pada tahun 1980 sampai sekarang Atas permasalahan tersebut, maka menjadi penting untuk melakukan terobosan – terobosan agar supaya sinkronisasi dokumen perencanaan baik dari desa, SKPD pemerintah ataupun pemerintah daerah baik jangka menengah maupun tahunan melalui pembenahan kualitas rencana dari bawah.

Dengan dimilikinya rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang berkualitas maka akan memudahkan kegiatan pembangunan tahunan sehingga akan menjamin kesinambungan program.

Maksud dan tujuan

a. Maksud

Agar kelurahan memiliki rencana induk pembangunan yang terarah dan berkesinambungan dalam waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang terkoordinasi dengan rencana strategis SKPD serta

rencana pembangunan menengah kabupaten/kota. Sehingga akan memudahkan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan kelurahan (RKP-kel)

b. Tujuan :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Menciptakan rasa memiliki tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan kelurahan
3. Memelihara dan mengembangkan hasil – hasil pembangunan di kelurahan
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kelurahan

Landasan hukum

- a. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional
- b. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- c. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan
- d. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa
- e. Peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa
- f. Peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan nomor 10 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi Sulawesi selatan

- g. Peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan nomor 12 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Sulawesi selatan

4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada di kelurahan Lanna kecamatan parangloe kabupaten gowa

4.1.2 Kondisi Geografi

Kelurahan Lanna adalah salah satu kelurahan dalam wilayah kecamatan parangloe, kabupaten gowa, memiliki karakteristik Topografi sebagai daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh perbukitan yang terdiri dari tanah landai, bergelombang dan berbukit dengan ketinggian sekitar 300-400 M diatas permukaan laut.

4.1.3 Letak Dan Luas Wilayah

Kelurahan Lanna berada 43-44 Km dari Makassar, pembagian wilayah kelurahan lanna terdiri atas 2 lingkungan yaitu lingkungan parang parang, dan lingkungan bontosunggu, 5 RW (Rukun Warga), 12 RT (Rukun Tetangga), dan luas wilayah 8,75 Km².

Batas-batas wilayah Kelurahan Lanna:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Belapunranga.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Borisallo.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bilalang Kec.Manuju.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bontoparang.

Visi, Misi

a. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kelurahan. Penyusunan visi kelurahan lanna ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan di kelurahan lanna seperti pemerintahan kelurahan, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat kelurahan dan masyarakat kelurahan pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di kelurahan seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas visi kelurahan lanna adalah :

‘‘mewujudkan kelurahan lanna menjadi kelurahan andalan di kabupaten gowa sejajar dengan kelurahan lainnya di Sulawesi selatan dalam mensejahterakan masyarakat lahir n bathin ‘‘

b. MISI

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kelurahan agar tercapainya visi kelurahan tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan kelurahan lanna, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi kelurahan lanna adalah:

1. Meningkatkan pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional
2. Meningkatkan system dan mekanisme pemerintahan

3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
4. Mengoptimalkan sumber daya alam (SDA)
5. Meningkatkan pendapatan asli kelurahan sebagai penggerak pemerintahan

Tabel 4.1 Keadaan Jumlah Penduduk Kelurahan Lanna menurut Golongan Umur

No	Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	175	160	335
2	5-12	178	171	349
3	13-15	143	129	272
4	16-18	104	133	237
5	19-25	186	205	391
6	26-35	295	391	686
7	36-45	233	244	477
8	46-50	59	51	110
9	51-60	59	64	123
10	61-75	96	116	212
11	75>	3	4	7
12	Jumlah	1.531	1.668	3.199

(Sumber Data : Kantor lurah lanna, desember 2018)

Berdasarkan Tabel diatas jumlah penduduk seluruhnya adalah 3.199 orang, yang terdiri dari 1.531 orang laki-laki dan 1.668 orang perempuan.

Dari jumlah penduduk tersebut dapat digolongkan menurut jenis kelamin dan golongan umur.

4.1.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk kelurahan Lanna kecamatan Parangloe, kab. Gowa mata pencahariannya beragam. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	%
1	Pegawai negeri sipil	135	4,22
2	Guru	149	4,65
3	Polri	73	2,28
4	TNI	57	1,78
5	Petani sawah/kebun	775	24,22
6	Pedagang	415	12,97
7	Karyawan swasta	116	3,62
8	Buruh/pekerja	105	3,28
9	Nelayan	25	0,78
10	Perbengkelan	10	0,31
11	Kerajinan kayu	3	0,09
12	Peternakan	95	2,96
13	Lain-lain	1241	38,79
	Jumlah	3199	100

(Sumber Data : Kantor lurah lanna, desember 2018)

Tabel diatas memberi gambaran bahwa mata pencaharian penduduk di kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kab. Gowa sangat bervariasi. Tetapi dapat dilihat dari tabel diatas mayoritas (38,79)% belum bekerja/lain-lain, dengan demikian tanggungan pemerintah untuk mengembangkan Kelurahan Lanna menjadi kelurahan yang maju sangat banyak, dan masyarakat yang sudah bekerja mayoritas (24,22%) atau sebanyak 775 orang masyarakat kelurahan lanna

mempunyai pekerja petani sawah/kebun. Dan Minoritas masyarakat kelurahan lanna bekerja sebagai kerajinan kayu sebanyak 0,09% atau 3 orang.

Tabel 4.3 pendapatan masyarakat

Tahun	Rasio kemandirian keuangan daerah %	Pertumbuhan ekonomi %	PAD (rupiah)
2011	1.60	6.66	115.546.360
2012	2.47	5.73	479.122.042
2013	3.02	6.86	856.900.275
2014	3.80	6.06	876.445.110
2015	4.44	5.50	901.382.655
2016	3.96	7.82	951.551.201

(Sumber Data : Kantor lurah lanna, desember 2018)

Data dalam tabel 4.1.5 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan di daerah kelurahan lanna memiliki trend atau pola yang semakin meningkat setiap tahunnya meskipun tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi cenderung memiliki pola perkembangan yang lebih efektif atau mengalami pola meningkat dan menurun setiap tahunnya, pendapatan asli daerah (PAD) kelurahan lanna memiliki trend meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan urian tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keuangan daerah. Oleh karena itu untuk membuktikan hal tersebut perlu

dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan.

4.1.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Di kelurahan lanna kecamatan parangloe kabupaten gowa, tingkat pendidikan penduduk memperlihatkan komposisi yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pendidikan cukup tinggi. Apalagi pemerintah kabupaten gowa merencanakan program pendidikan gratis sehingga masyarakat tidak ada lagi yang anaknya putus sekolah. Selain itu pemerintah juga merencanakan program pengentasan Buta Aksara bagi masyarakat yang belum tahu membaca dan menulis. Berkaitan dengan keadaan penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan untuk lebih jelasnya secara umum dapat diperhatikan gambarnya pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

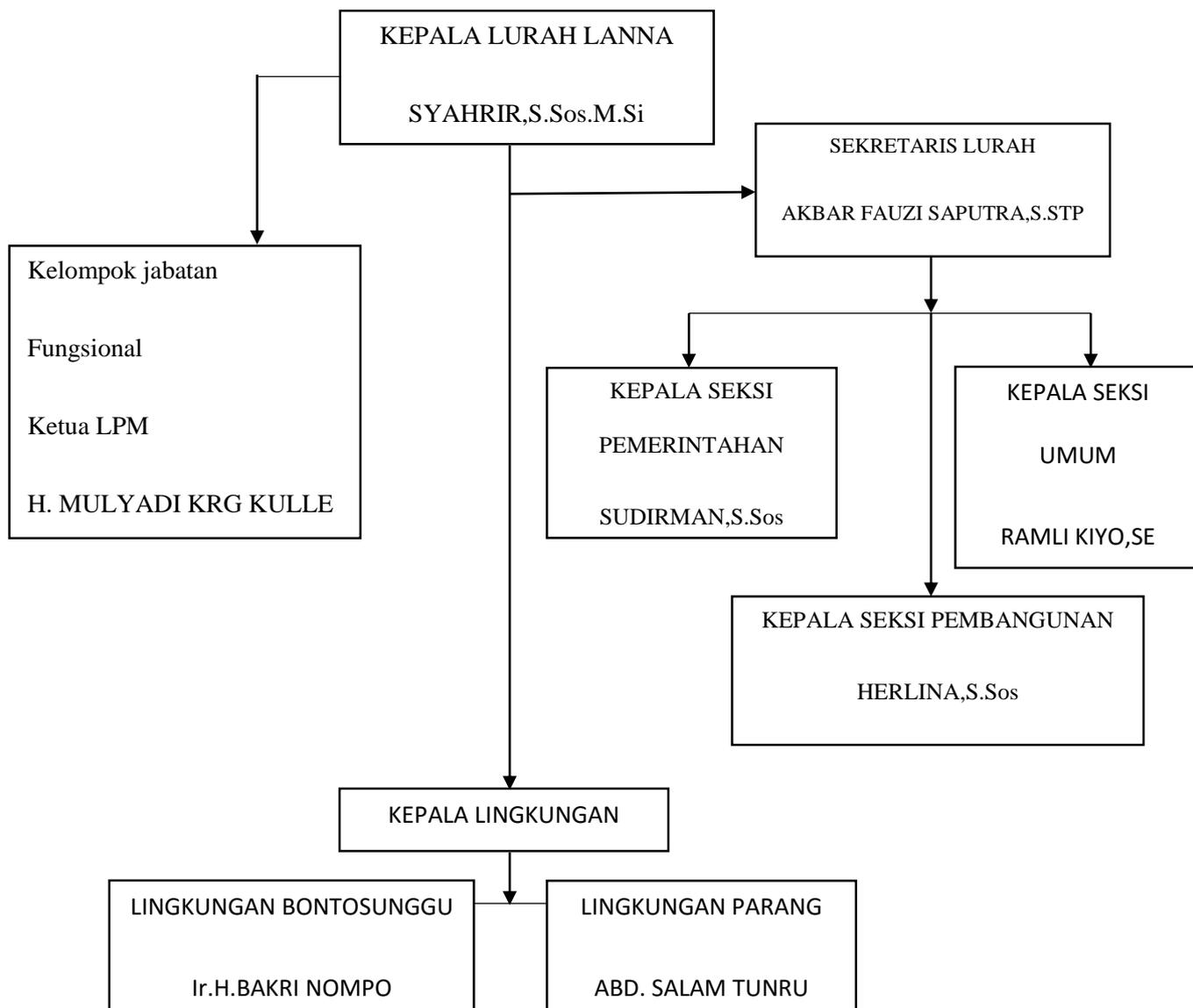
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Belum tamat SD/ sederajat	175	5,47
2	Tamat SD/ sederajat	434	13,36
3	Tamat SLTP/ sederajat	825	25,78
4	Tamat SLTA/ sederajat	1345	42,04
5	Tamat perguruan tinggi	420	13,13
	Jumlah	3199	100

(Sumber data : Kantor lurah lanna, desember 2018)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pendidikan kelurahan Lanna belum tamat SD/ sederajat sebanyak 175 orang atau 5,47%, tamat SD/ sederajat sebanyak 434 orang atau 13,56%, tamatan SLTP/ sederajat 825 orang atau 25,78%, tamatan SLTA/ sederajat sebanyak 1345 orang atau 42,04% dan tamatan perguruan tinggi sebanyak 420 orang atau 13,13%.

Jadi tingkat pendidikan yang paling tinggi di kelurahan lanna hanya sampai taman SLTA/ sederajat dengan rata 1345 orang atau 42,04% kesadaran masyarakat lanna sangat tinggi terhadap tingkat pendidikan untuk masa depan anaknya supaya tidak putus sekolah, jadi pihak pemerintah gowa mengaspirasi terhadap program pendidikan gratis sedangkan taman perguruan tinggi menyampai rata - rata 420 orang atau 13,13 % , pihak pemerintah gowa tetap menjalankan program pendidikan gratis di setiap kelurahan yang ada di kabupaten gowa meningkatkan peranan program tersebut.

4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Lanna



4.2 Identitas Responden

Dari hasil data peneliti responden terdiri atas 40 (empat orang) anggota SPP yang berjenis kelamin keseluruhan perempuan. Dari tingkat pendidikan pun berbeda yang terdiri atas dari jenjang SD sebanyak 8 orang, dari jenjang SMP sebanyak 13 orang, dari jenjang SMA sebanyak 14 orang dan dari jenjang SI sebanyak 5 orang.

Jumlah responden berdasarkan jumlah kelompok SPP penerima dana program SPP dikelurahan lanna, kecamatan parangloe, kabupaten gowa dilihat pada tabel berikut ini yaitu

Tabel 4.5 Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Kelompok SPP Penerima Dana Program SPP

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota
1	Pakbantengan	8
2	Mentari turaya	9
3	Je'neberang	7
4	Bontosunggu jaya	8
5	Bulu' turaya	8
	Jumlah	40

Dari hasil data jumlah responden jumlah kelompok SPP penerima dana program SPP mencapai 40 anggota bahwa saja jumlah kelompok SPP kelurahan lanna sangat tinggi di karenakan antusias masyarakat lanna sangat signifikan terhadap program tersebut.

4.2.1 Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Stoner (1981) dalam Sudiana (2004:17) mengemukakan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, pengadilan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih diharapkan.

Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi (oteng sutiasna: 1983). Pengelolaan yang dimaksud dengan penelitian ini adalah suatu tahapan kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengewasan, penelitian (Evaluasi) di kelurahan Lanna, kecamatan Parangloe, kabupaten gowa.

Dalam penelitian ini penelitian mengambil jalur penelitian dalam ruang lingkup pengelolaan program dana simpan pinjam perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikulurahan Lanna kecamatan Parangloe kabupaten gowa yang meliputi:

4.2.2 Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup proses pengambilan

keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. Waterson (1965) mengemukakan bahwa pada hakekatnya perencanaan merupakan usaha sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan untuk memilih alternative yang terdapat dari sejumlah alternative tindakan guna mencapai tujuan.

Perencanaan bukan kegiatan yang tersendiri melainkan merupakan suatu bagian dari proses pengambilan keputusan kompleks. Oleh karena itu schaffer (1970) menjelaskan bahwa apabila perencanaan di bicarakan, kegiatan ini tidak akan terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan tersebut dimulai dengan perumusan tujuan, kebijaksanaan dan sasaran secara luas yang kemudian berkembang pada tahapan pencapaian tujuan. Kebijaksanaan dalam rencana yang lebih rinci berbentuk program-program untuk dilaksanakan.

Dalam tujuan PNPM mandiri tersebut seluruhnya menyatakan bertujuan untuk memberdayakan seluruh masyarakat di indonesia dengan sasaran masyarakat miskin agar mereka bisa berdaya dan bisa mengimbangi ataupun bersaing dengan masyarakat golongan menengah ke atas.

Dalam perencanaan program PNPM mandiri sasaran program merupakan suatu hal yang diutamakan oleh pihak PNPM mandiri, lokasi sasaran PNPM mandiri pedesaan meliputi seluruh kecamatan pedesaan di indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM mandiri pedesaan. PNPM mandiri ini selalu mempunyai sasaran kelompok yaitu masyarakat miskin

di pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan, kelembagaan-kelembagaan lokasi.

Tabel 4.6

Sosialisasi tentang informasi dana simpan pinjam perempuan (SPP)

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat efektif	20	50
2	Efektif	20	50
3	Kurang efektif	-	-
4	Tidak efektif	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, mei 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 20 orang responden atau 50% yang menyatakan sosialisasi tentang informasi dana simpan pinjam perempuan (SPP) sangat efektif, dan 20 orang responden atau 50% yang menyatakan sosialisasi tentang informasi dana simpan pinjam perempuan (SPP) efektif, dan tidak ada responden yang menyatakan sosialisasi tentang informasi dana simpan pinjam perempuan (SPP) kurang efektif, serta tidak ada responden yang menyatakan sosialisasi tentang informasi dana simpan pinjam perempuan (SPP) tidak efektif.

Maksud dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa sosialisasi tentang informasi dana simpan pinjam perempuan (SPP) diterima dengan baik oleh responden, pengetahuan responden sangat berpengaruh pada penyusunan administrasi kelompok baik pengelola maupun anggota SPP.

Untuk mengetahui pengetahuan responden tentang simpan pinjam perempuan (SPP) dikelurahan lanna kecamatan parangloe kabupaten gowa, berikut ini dikemukakan hasil wawancara anggota simpan pinjam perempuan.

Tabel 4.7 Pengetahuan masyarakat tentang simpan pinjam perempuan (SPP)

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentasi (%)
1	Sangat berpengaruh	15	37,5
2	Berpengaruh	25	62,5
3	Kurang berpengaruh	-	-
4	Tidak berpengaruh	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang responden atau 37,5% yang menyatakan pengetahuan responden tentang simpan pinjam perempuan (SPP) sangat berpengaruh, dan 25 orang responden atau 62,5% yang menyatakan responden tentang simpan pinjam perempuan (SPP) berpengaruh, dan tidak ada responden yang menyatakan pengetahuan responden tentang simpan pinjam perempuan (SPP) kurang berpengaruh, serta tidak ada responden yang menyatakan pengetahuan tentang simpan pinjam perempuan (SPP) tidak berpengaruh.

Maksud dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa pengetahuan tentang simpan pinjam perempuan (SPP) sangat berpengaruh dalam menyusun administrasi kelompok.

Tabel 4.8 Cara pengajuan dana simpan pinjam perempuan (SPP)

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat mudah	22	55
2	Mudah	18	37,5
3	Kurang mudah	-	-
4	Tidak mudah	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 22 orang responden atau 55% yang menyatakan cara pengajuan dana simpan pinjam perempuan (SPP) sangat mudah, dan 18 orang responden atau 37,5% yang menyatakan cara pengajuan dana simpan pinjam perempuan (SPP) mudah, dan tidak ada responden yang menyatakan cara pengajuan dana simpan pinjam perempuan (SPP) tidak mudah, serta tidak ada responden yang menyatakan cara pengajuan dana simpan pinjam perempuan (SPP) tidak mudah.

Maksud dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa cara pengajuan dana simpan pinjam perempuan (SPP) sangat mudah bagi kelompok simpan pinjam perempuan.

Tabel 4.9
Administrasi

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat baik	12	30
2	Baik	28	70
3	Kurang baik	-	-
4	Tidak baik	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang responden atau 30% yang menyatakan administrasi kelompok dana simpan pinjam perempuan (SPP) sangat baik, dan 28 orang responden atau 70% yang menyatakan administrasi dana simpan pinjam perempuan (SPP) baik, dan tidak ada responden yang menyatakan administrasi dana simpan pinjam perempuan (SPP) kurang baik, serta tidak ada responden yang menyatakan administrasi dana simpan pinjam perempuan (SPP) tidak baik.

Maksud dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa administrasi kelompok dana simpan pinjam perempuan (SPP) baik bagi kelompok simpan pinjam perempuan karena setiap masyarakat kelurahan parangloe kecamatan lanna sangat aktif mengenai administrasi jadi tingkat pemahaman masyarakat sangat paham.

4.2.3 Pelaksanaan

Dalam hubungan dengan tujuan, kegiatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pertama, kegiatan yang terarah pada pencapaian tujuan dan kedua, kegiatan yang mengandung tujuan. Kegiatan yang terarah pada pencapaian tujuan pada dasarnya adalah tingkah laku yang digerakkan atau dimotivasi. Sebagai misalnya seseorang yang dalam keadaan lapar akan berusaha mencari makanan baik dengan cara membeli atau meminta maupun dengan membuat makanan itu.

Usaha tersebut diarahkan pada tujuan tertentu yaitu untung menghilangkan rasa lapar. Adapun kegiatan yang mengandung tujuan adalah suatu perbuatan yang sekaligus menjadi tujuan. Contohnya makan adalah perbuatan dan tujuannya adalah untuk makan. Kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan pada

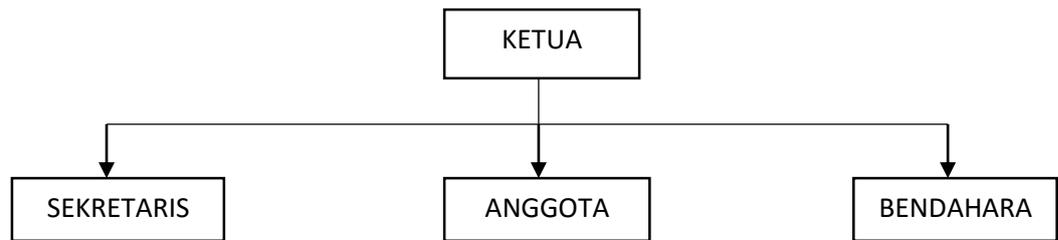
dasarnya lebih intensif dari pada kegiatan yang mengandung tujuan. Intensitas kegiatan yang disebut pertama terjadi karena adanya rangsangan, dorongan atau adanya kebutuhan yang lebih kuat dibandingkan dengan faktor pendorong pada kegiatan yang disebut kedua. Apabila faktor pendorong makin berkurang maka perbuatan akan menjadi kegiatan yang mengandung tujuan saja, misalnya seseorang maka siang pada jam 12.00 walaupun ia sendiri belum merasa lapar. Namun kegiatan akan meningkat apabila perbuatan terarah atau diarahkan pada pencapaian tujuan diperlukan upaya penggerakan atau motivasi.

Sepanjang perkembangannya, pengorganisasian sebagai fungsi manajemen, memiliki pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang keahlian para pakar yang memberikan pengertian itu, dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dalam menerapkan fungsi pengorganisasian tersebut.

Menurut Siagian (1982:4-5) memberi batasan tentang pengorganisasian sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Kelompok-kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang ada di Kelurahan Lanna dalam menjalankan kegiatan kelompoknya agar berjalan dengan aturan kelompok yang telah ditetapkan, setiap kelompok harus memiliki struktur kelompok, masing-masing kelompok terdapat pengurus kelompok yang terdiri dari 1 orang ketua kelompok, 1 orang sekretaris dan 1 orang bendahara kelompok,

jangka waktu kepengurusan yaitu 1 tahun. Struktur kelompok masing-masing kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), untuk lebih jelasnya struktur masing-masing kelompok dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 struktur kelompok SPP

Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti ingin mengungkap bagaimana pendapat masyarakat pentang pelaksanaan SPP program PNPM mandiri sesuai dengan kisi-kisi sebagai berikut:

- a. Strategi pelaksanaan pembagian dana
- b. Peran pengelola
- c. Proses pencairan
- d. Proses pengembalian dana
- e. Pelayanan pengelola
- f. Jumlah dana

Sesuai dengan hasil penelitian maka peneliti mengungkapkan pelaksanaan program SPP PNPM MP seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Strategi pelaksanaan pembagian dana

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat efektif	10	25
2	Efektif	30	75
3	Kurang efektif	-	-
4	Tidak efektif	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber: hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 10 orang responden atau 25% yang menyatakan strategi pelaksanaan pembagian dana sangat baik, dan 30 orang responden atau 75% yang menyatakan strategi pelaksanaan pembagian dana baik, dan tidak ada responden yang menyatakan strategi pelaksanaan pembagian dana kurang baik, serta tidak ada responden yang menyatakan strategi pelaksanaan pembagian dana tidak baik.

Maksud dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa strategi pelaksanaan pembagian dana baik bagi kelompok simpan pinjam perempuan, bisa lihat tabel di atas sangat signifikan terhadap tingkat responden sangat baik 75%.

Tabel 4.11 Peran pengelola pelaksanaan pembagian dana

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat efektif	20	50
2	Efektif	20	50
3	Kurang efektif	-	-
4	Tidak efektif	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 20 orang reponden ata 50% yang menyatakan peran

pengelola dalam pelaksanaan pembagian dana sangat efektif, dan 20 orang responden atau 50% tidak ada responden yang menyatakan peran pengelola pelaksanaan pembagian dana kurang efektif, serta tidak ada responden yang menyatakan peran pengelola dalam pelaksanaan pembagian dana tidak efektif.

Maksud dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa peran pengelola dalam pelaksanaan pembagian dana efektif bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

Tabel 4.12
Proses Pencairan Dana kelompok simpan pinjam perempuan

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat baik	19	47,5
2	Baik	21	52,5
3	Kurang baik	-	-
4	Tidak baik	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa 19 orang responden atau 47,5% yang menyatakan proses pencarian dana sangat baik, dan 21 orang responden atau 52,5% yang menyatakan proses pencarian dana baik, dan tidak ada responden yang menyatakan proses pencarian dana kurang baik, serta tidak ada responden yang menyatakan proses pencarian dana tidak baik.

Maksud dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa proses pencairan dana baik bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

Tabel 4.13 Proses Pengembalian Dana

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat lancar	8	20
2	Lancar	32	80
3	Kurang lancar	-	-
4	Tidak lancar	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 8 orang responden atau 20% yang menyatakan proses pengembalian dana sangat lancar, dan 32 orang responden atau 80% yang menyatakan proses pengembalian dana lancar, dan tidak ada responden yang menyatakan proses pengembalian dana kurang lancar, serta tidak ada responden yang menyatakan proses pengembalian dana tidak lancar.

Maksud dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa proses pengembalian dana lancar bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

Tabel 4.14 Pelayanan Pengelola

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat baik	21	52,5
2	Baik	19	47,5
3	Kurang baik	-	-
4	Tidak baik	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 21 orang responden atau 52,5% yang menyatakan pelayanan pengelola bagi kelompok dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

sangat baik, dan 19 orang responden atau 47,5% yang menyatakan pelayanan pengelola bagi kelompok dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) baik, dan tidak ada responden yang menyatakan pelayanan pengelola bagi kelompok dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kurang baik, serta tidak ada responden yang menyatakan pelayanan pengelola bagi kelompok dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak baik.

Maksud dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa pelayanan pengelola bagi kelompok dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat baik bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

Tabel 4.15 Jumlah dana yang diberikan kepada kelompok SPP

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat memuaskan	11	27,5
2	Memuaskan	29	72,5
3	Kurang memuaskan	-	-
4	Tidak memuaskan	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 11 orang responden atau 27,5% yang menyatakan jumlah dana yang diberikan kepada kelompok dana simpan pinjam perempuan (SPP) sangat memuaskan, dan 29 orang responden atau 72,5% yang menyatakan jumlah dana yang diberikan kepada kelompok dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memuaskan, dan tidak ada responden yang menyatakan jumlah dana yang diberikan kepada kelompok dana simpan pinjam perempuan (SPP) kurang memuaskan serta tidak ada responden yang menyatakan jumlah dana yang

diberikan kepada kelompok dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak memuaskan.

Maksud dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa jumlah dana yang diberikan kepada kelompok dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat memuaskan.

4.3 Pengawasan

Menurut Robert J. Mockler pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan baik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Pengadilan atau pengawasan adalah proses mengarahkan seperangkat variabel (manusia, peralatan, mesin, organisasi) kearah tercapainya suatu tujuan atau sasaran manajemen. Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan itu bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasi.

Menurut T.Hani Handoko bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan yaitu:

- a. Penetapan standar pelaksanaan
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan

4.4 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait mengkait antara satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian proses manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen.

Fungsi pengawasan yaitu suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang sah dilakukan menilai dan mengoreksi agar pelaksanaannya pekerjaan itu sesuai dengan rencana semula.

Dalam panduan PNPM-MP pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM-MP melihat kinerja semua pelaku PNPM-PM serta melakukan identifikasi dan mengatasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku pengelola SPP PNPM-MP yaitu, anggota SPP, masyarakat, aparat pemerintahan diberbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan dan lain-lain.

Hasil pengawasan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pengelola SPP dan masyarakat.

Evaluasi dalam PNPM-MP dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil dari pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan program dan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penelitian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria atau standar yang ditentukan maka dilakukan pengecekan kelengkapan, melakukan melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Hasil kegiatan evaluasi dilakukan oleh pelaku-pelaku pengelola SPP dapat dilihat dengan menggunakan indikato-indikator diantaranya tingkat perkembangan kelompok atau perubahan kelompok selama menggunakan dana SPP.

Dari hasil pengawasan ini peneliti dapat mengungkap bahwa pengawasan dilakukan oleh pengelola SPP memang cukup baik tetapi terkadang pengelola sangat lambat ketika kelompok SPP mempunyai permasalahan dan memecahkan permasalahan tersebut, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Kinerja pelaku pengelola SPP dalam pemantauan dan pengawasan

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat optimal	5	12,5
2	Optimal	35	87,5
3	Kurang optimal	-	-
4	Tidak optimal	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahawa sebanyak 5 orang responden atau 12,5% yang menyatakan kinerja pelaku pengelola simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemantauan dan pengawasan sangat optimal, dan 35 orang responden atau 87,5% yang menyatakan kinerja pelaku pengelola simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemantauan dan pengawasan optimal, dan tidak ada responden yang menyatakan kinerja pelaku pengelola simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemantauan dan pengawasan kurang optimal serta tidak ada responden yang menyatakan kinerja pelaku pengelola simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemantauan dan pengawasan tidak optimal.

Maksud dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa kinerja pelaku pengelola simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pemantauan dan pengawasan optimal.

Tabel 4.17 Permasalahan penggunaan dana pada kelompok SPP

No	Jadwal informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat bermasalah	10	25
2	Bermasalah	30	75
3	Kurang bermasalah	-	-
4	Tidak bermasalah	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 10 orang responden atau 25% yang menyatakan permasalahan penggunaan dana pada kelompok simpan pinjam perempuan sangat bermasalah, dan 30 orang responden atau 75% yang menyatakan permasalahan penggunaan dana pada kelompok simpan pinjam perempuan bermasalah, dan tidak ada responden yang menyatakan permasalahan penggunaan dana simpan pinjam perempuan tidak bermasalah serta tidak ada responden yang menyatakan permasalahan penggunaan dana pada kelompok simpan pinjam perempuan tidak bermasalah.

Maksud dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa permasalahan menggunakan dana pada kelompok simpan pinjam perempuan bermasalah, karena masyarakat kurang pemahaman terhadap apa yang dia dapat.

Tabel 4.18 Peran pengelola dalam menghadapi setiap permasalahan

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat efektif	17	42,5
2	Efektif	33	82,5
3	Kurang efektif	-	-
4	Tidak efektif	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 17 orang responden atau 42,5% yang menyatakan peran pengelola dalam menghadapi permasalahan pada kelompok simpan pinjam perempuan sangat efektif, dan 33 orang responden atau 82,5% yang menyatakan peran pengelola dalam menghadapi permasalahan pada kelompok simpan pinjam perempuan efektif serta tidak ada responden yang menyatakan peran pengelola dalam menghadapi permasalahan pada kelompok simpan pinjam perempuan kurang efektif serta tidak ada responden yang menyatakan peran pengelola dalam menghadapi permasalahan pada kelompok simpan pinjam perempuan tidak efektif.

Maksud dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa peran pengelola dalam menghadapi permasalahan pada kelompok simpan pinjam perempuan efektif.

Tabel 4.19 Pelatihan penggunaan dan dalam penyelesaian permasalahan

No	Jawaban informasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat perlu	9	22,5
2	Perlu	31	77,5
3	Kurang perlu	-	-
4	Tidak perlu	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : hasil olahan kuesioner, desember 2018

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 9 orang responden atau 22,5% yang menyatakan pelatihan penggunaan dana dalam penyelesaian permasalahan pada kelompok simpan pinjam perempuan sangat perlu, dan 31 orang responden atau 77,5% yang

menyatakan pelatihan penggunaan dana dalam penyelesaian permasalahan pada kelompok simpan pinjam perempuan perlu, dan tidak ada responden yang menyatakan pelatihan penggunaan dana dalam penyelesaian permasalahan pada kelompok simpan pinjam perempuan kurang perlu serta tidak ada responden yang menyatakan pelatihan penggunaan dana dalam penyelesaian permasalahan pada kelompok simpan pinjam perempuan tidak perlu.

Maksud dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa pelatihan penggunaan dana dalam penyelesaian permasalahan pada kelompok simpan pinjam perempuan perlu dilaksanakan agar tidak ada lagi permasalahan yang timbul.

A. Deskripsi variabel pengelolaan dana simpan pinjam perempuan variabel independen (X)

Untuk melihat tanggapan responden terhadap indikator dan juga perhitungan skor untuk variabel pengelolaan dana simpan pinjam perempuan di mana indikator tersebut direpresentasikan dalam satu pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20

**Tanggapan Responden Terhadap pengelolaan dana simpan pinjam
perempuan**

No	Tanggapan Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Skor
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Saya selalu Meningkatkan kemampuan dalam mengelola program dana simpan pinjam perempuan di kelurahan lanna	1	2%	14	35%	12	30%	13	32%	-	-	123
2	Saya selalu Meningkatkan sikap kepemimpinan saya dalam memimpin program dana simpan pinjam perempuan di kelurahan lanna	3	7%	13	32%	15	37%	9	22%	-	-	130
3	pengelolaan program dana simpan pinjam perempuan dapat Meningkatkan kemampuan saya mengelola usaha di kelurahan lanna	8	20%	16	40%	13	32%	3	7%	-	-	149
Range skor												134

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap kategori pengelolaan data simpan pinjam perempuan berada pada range keempat (di antara range skor 120 - 142) yaitu tinggi. Dari tanggapan responden terhadap pengelolaan data simpan pinjam perempuan lebih memilih setuju artinya responden tertarik dengan meningkatkan kemampuan dalam mengelola program dana simpan pinjam perempuan di kelurahan lanna.

B. Deskripsi Variabel Tingkat kesejahteraan variabel Dependen (Y)

Untuk melihat tanggapan responden terhadap indikator dan juga perhitungan skor untuk variabel tingkat kesejahteraan. Indikator-indikator dari variabel ini yaitu pendapatan, tingkat pendidikan semakin tinggi, dan kesehatan anggota di mana indikator tersebut direpresentasikan dalam satu pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21

Tanggapan Responden Terhadap tingkat kesejahteraan

No	Tanggapan	SS		S		N		TS		STS		Skor
	Pernyataan	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Pengelolaan Pendapatan di kelurahan lanna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	14	35 %	7	17 %	9	22 %	10	25 %	-	-	145
2	Kemajuan pendidikan di kelurahan lanna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	9	22 %	11	27 %	12	30 %	8	20 %	-	-	140
3	Pengelolaan Kesehatan anggota di kelurahan lanna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	10	25 %	10	25 %	10	25 %	10	25 %	-	-	141
Range skor												142

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap kategori tingkat kesejahteraan berada pada range ketiga (di antara range skor 135 – 150) yaitu Cukup. Dari tanggapan responden terhadap tingkat kesejahteraan lebih memilih Netral, artinya responden tertarik dengan kemajuan pendidikan di kelurahan lanna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.5 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Data

4.5.1 Hasil Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan kata lain, mampu memperoleh data yang tepat dari variable yang diteliti. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat pengujian adalah kalau $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (0,30). Jadi, korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,30, maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Pada perhitungan validitas dan reliabilitas instrumen item masing-masing variabel pada penelitian yang dilakukan menggunakan program SPSS 23.0. Untuk selanjutnya peneliti membuat rekapitulasi hasil uji validitas dan reliabilitas seperti dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 4.22 Hasil Uji Validitas

Variabel		r hitung	Keterangan
Pengelolaan dana simpan pinjam perempuan	X	0.787	Valid
	X	0.745	Valid
	X	0.734	Valid
Tingkat kesejahteraan	Y	0.717	Valid
	Y	0.730	Valid
	Y	0.806	Valid

Sumber : Data olahan SPSS (2018)

Dari tabel di atas diketahui bahwa variabel bebas (pengelolaan dana simpan pinjam perempuan) dan variabel terikat (tingkat kesejahteraan) dinyatakan valid

karena $r_{hitung} \geq r_{table}$ (0,30). Berdasarkan nilai uji validitas butir instrumen seluruh variabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian sudah representatif. Dalam artian mampu mengungkapkan data dan variabel yang diteliti secara tepat.

4.3.2 Reliabilitas Data

Suatu instrumen dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien kehandalan (Alpha Cronbach) sebesar 0,6 atau lebih. Jadi jika nilai reliabilitas > nilai Alpha Cronbach (0,6), maka butir kuesioner dikatakan reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas dari data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

4.23 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Pengelolaan dana simpan pinjam perempuan (X)	0,624	Reliabel
Tingkat kesejahteraan (Y)	0,610	Reliabel

Dari tabel di atas diketahui bahwa variabel bebas (pengelolaan dana simpan pinjam perempuan) dengan koefisien alpha sebesar 0,624 dan variabel terikat (tingkat kesejahteraan) dinyatakan dengan koefisien alpha sebesar 0,610 dinyatakan reliabel karena Koefisien alpha > (0,60). Berdasarkan nilai uji Reliabilitas butir instrumen seluruh variabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian sudah handal, dalam artian telah lulus uji Instrumen dengan menggunakan uji reliabilitias.

4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan melihat uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa data yang diuji berdistribusi normal, hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

4.6.1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,61666850
Most Extreme Differences	Absolute	,092
	Positive	,092
	Negative	-,061
Test Statistic		,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan output SPSS, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,200 yang mengartikan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

4.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glesjer maksudnya adalah Glesjer ini mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.6.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,607	,509		1,193	,240
pengelolaan dana simpan pinjam perempuan	,878	,149	,691	5,888	,000

a. Dependent Variable: tingkat kesejahteraan

Berdasarkan output SPSS diketahui bahwa nilai signifikansi variabel *pengelolaan dana simpan pinjam perempuan* (X) sebesar 0,240 artinya tidak terjadi Heteroskedastisitas pada variabel *tingkat kesejahteraan* (Y). Pada uji Heteroskedastisitas, dikatakan memenuhi jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. Dengan demikian disimpulkan bahwa data ini memenuhi uji Asumsi Klasik pada Uji Heteroskedastisitas.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Analisis Data Penelitian

Analisis regresi linear sederhana digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 23.0. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah sebagai berikut :

4.7.1 Hasil uji analisis regresi linear sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	,607	,509		1,193	,240	-,424	1,639
pengelolaan dana simpan pinjam perempuan	,878	,149	,691	5,888	,000	,576	1,180

a. Dependent Variable: tingkat kesejahteraan

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam bentuk *Unstandardized* dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,607 + 0,878 X$$

Model persamaan persamaan regresi *unstandardized Coefficients*, nilai koefisiennya sebagai berikut:

- a. Konstanta **0,607** berarti bahwa tingkat kesejahteraan akan konstan sebesar **0,607** dipengaruhi variable pengelolaan dana simpan pinjam (X)
- b. Koefisien regresi X sebesar **0,878** memberikan arti bahwa pengelolaan dana simpan pinjam (X) berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan 1% pada pengelolaan dana simpan pinjam, maka akan terjadi intensitas tingkat kesejahteraan sebesar 0.878.

4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis

a. Hasil uji parsial (uji-t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial variabel independen (Budaya Organisasi) terhadap variabel dependen (Komitmen Organisasi). Sementara itu secara parsial pengaruh dari variabel independen tersebut terhadap Komitmen Organisasi ditunjukkan pada tabel berikut:

Pengujian dengan membandingkan nilai probabilitas t_{hitung} dengan probabilitas 0,05. Apabila nilai probabilitas $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ sebesar 1,991 (nilai ini diperoleh dari Ms Excel =TINV(5%;76) lalu enter) maka hipotesis diterima. Berdasarkan pertimbangan tabel 4.11 diperoleh kesimpulan yaitu Pengaruh pengelolaan dana simpan pinjam perempuan terhadap tingkat kesejahteraan.

Pernyataan hipotesis

H0 = tidak ada pengaruh pengelolaan dana simpan pinjam perempuan (SPP) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kelurahan Lanna kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

H1 = ada pengaruh pelaksanaan program simpan pinjam bagi perempuan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kelurahan lanna kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel untuk pengelolaan dana simpan pinjam (X) dengan t_{hitung} (5,888) > t_{tabel} (1,993) serta nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ sehingga terbukti bahwa variabel **pengelolaan dana simpan pinjam berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan** maka pada tingkat kepercayaan 95% hipotesis dinyatakan sebagai **Ha diterima dan H0 ditolak**.

b. Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini

Tabel 4.5.3

Hasil uji koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,691 ^a	,477	,463	,62473	,477	34,671	1	38	,000

a. Predictors: (Constant), pengelolaan dana simpan pinjam perempuan

b. Dependent Variable: tingkat kesejahteraan

Dari data pada tabel 4.12 Model Summary tersebut, diketahui *R Square* sebesar 0,477. Berdasarkan nilai R Square (R^2) ini dapat dikatakan bahwa sebesar 47,7 % variasi tingkat kesejahteraan yang dapat dijelaskan oleh pengelolaan dana simpan pinjam, sedangkan variasi tingkat kesejahteraan yang tidak dapat dijelaskan oleh pengelolaan dana simpan pinjam tetapi bisa dijelaskan oleh fakta – fakta lain yang tidak diamati oleh penelitian adalah sebesar 62,3 % (100% - 47,7%).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada pengelolaan program dana SPP (simpan pinjam perempuan) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tujuan umum dari PNPM MP adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dan kelurahan dan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pendapat masyarakat mengenai perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta hasil evaluasi masyarakat dari program simpan pinjam perempuan (SPP). Hal ini menjadikan tingkat pendidikan sebagai variabel yang memengaruhi pendapat masyarakat.

Perencanaan program dana SPP yang telah dilakukan pengelola SPP sesuai dengan pendapat masyarakat yang telah mendapatkan dana SPP dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelola dalam mengatasi permasalahan dalam perencanaan ini cukup baik karena sasaran yang ditetapkan cukup tepat bagi masyarakat dan dalam proses pengajuan masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika masyarakat mengikuti alur perencanaan.

Pelaksanaan program SPP yang dilaksanakan oleh pengelola di kelurahan Lanna, kecamatan Parangloe, kabupaten Gowa sangat baik dilakukan oleh

pengelola. Ini disimpulkan sesuai dengan pendapat masyarakat yang telah mendapatkan dana SPP.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaku pengelola SPP yaitu anggota SPP, masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM dll.

Pengawasan yang dilakukan para pengelola cukup baik ini sesuai dengan pendapat masyarakat bahwa dalam pengembangan usaha mereka perlu diadakan pelatihan dan pembinaan agar memperluas usaha masyarakat.

5.2 SARAN

1. Bagi pengelola SPP

- a. Hendaknya para pengelola lebih memberikan pelayanan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam setiap program SPP.
- b. Hendaknya pengelola lebih memberikan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan usahanya.

2. Bagi masyarakat

- a. Hendaknya masyarakat bisa bekerja sama dengan pengelola agar hasil yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

- b. Hendaknya masyarakat bisa bekerja sama dengan anggota masyarakat lain agar mereka bisa mengembangkan usaha.